



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAPORAN RENJA

2024

DI SUSUN OLEH :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sekretariat

<https://diskominfo.kuburayakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

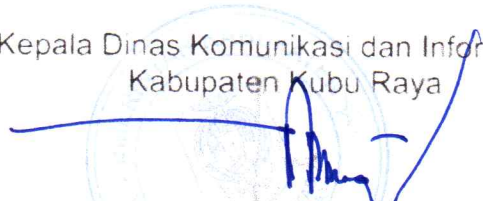
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi dan Informatika, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota,

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya



EDDY MUDIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660823-199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN 4

I. Latar belakang 4

II. Landasan hukum 5

III. Maksud dan tujuan..... 8

IV. Sistematika penulisan..... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 10

I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 10

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian (Simpan Diatas) 11

II. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 49

III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 59

IV. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 59

V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 85

VI. Tidak Ada Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika 87

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 89

I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 89

II. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 90

III. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 92

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 116

BAB V PENUTUP..... 120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian 11

Tabel 2. 2 Data PNS Dinas Komunikasi dan Informatika 54

Tabel 2. 3 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika 54

Tabel 2. 4 Data Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika 55

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 56

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 60

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 87

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab kepala SKPD. Rencana Kerja SKPD memuat penjelasan hubungan keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, hasil pelaksanaan MUSRENBANG daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menterjemahkan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dicapai oleh SKPD. Renja SKPD tahun 2023 ini merupakan dokumen tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti penting dan strategisnya dokumen Renja SKPD ini dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

II. Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (LN 2009/112, TLN 5038)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (LN 2017 /105, TLN 6056)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (LN 2021 /31, TLN 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (LN 2021/172);
18. Perpres 4/2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan Ekosistem;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Permendagri 53/2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (BN2020/794);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Kemendagri 3/2023 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Priode Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

29. Perbub Kalbar 9/2023 tentang Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 (BP PNV Kal-Bar 2023/12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);

III. Maksud dan tujuan

❖ Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya.

❖ Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah daerah tahun 2023.

IV. Sistematika penulisan

Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Memuat tentang latar belakang Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu raya mendapatkan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Rancangan Kerja Akhir Tahun (RKA) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.489.195.007,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 7.789.333.825** atau sebesar **91,76%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp3.736.897.576.** dengan Realisasi **Rp3.558.959.158** atau **95,24%**

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2025-2026		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	63.13 poin						

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	dokumen	8 dokumen	8	8	100%	8	8	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen	5 Dokumen	5	5	100%	5	5	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0%	-	-	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0%	-	-	
--	--	---------	-----------	---	---	----	---	---	--

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0%	-	-	
---	---	---------	-----------	---	---	----	---	---	--

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0%	-	-	
--	--	---------	-----------	---	---	----	---	---	--

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Laporan	4 Laporan	4	4	100%	4	4	100%
---	---	---------	-----------	---	---	------	---	---	------

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan	4 Laporan	4	4	100%	4	4	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2	2	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/bulan	56 Orang/bulan	56	56	100%	56	56	100%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Dokumen	3000 Dokumen	-	-	0%	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Laporan	2 Laporan	2	2	100%	2	2	100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	Laporan	3000 Laporan	3000	3000	100%	3000	3000	100%
---	--	---------	-----------------	------	------	------	------	------	------

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Laporan	2 Laporan	-	-	0%	-	-	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Laporan	2 Laporan	2	2	100%	2	2	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang difasilitasi</i>	Orang	56 Orang	56	56	100%	56	56	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Paket	2 Paket	-	-	0%	-	-	0%

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0%	-	-	0%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2	2	100%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Orang	4 Orang	-	-	0%	-	-	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Orang	10 Orang	-	-	0%	-	-	0%

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Orang	10 Orang	-	-	0%	-	-	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Bulan	24 Bulan	24	24	100%	24	24	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	8 Paket	8	8	100%	8	8	100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Paket	4 Paket	4	4	100%	4	4	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Paket	48 Paket	48	48	100%	48	48	100%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Paket	24 Paket	24	24	100%	24	24	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Dokumen	4380 Dokumen	4380	4380	100%	4380	4380	100%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	10 Laporan	10	10	100%	10	10	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	unit	2 unit	2	2	100%	2	2	100%
Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Unit	2 Unit	2	2	100%	2	2	100%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Unit	2 Unit	2	2	100%	2	2	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	laporan	2 laporan	2	2	100%	2	2	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Laporan	48 Laporan	48	48	100%	48	48	100%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	74 Laporan	74	74	100%	74	74	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	unit	2 unit	2	2	100%	2	2	100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Unit	8 Unit	8	8	100%	8	8	100%
---	---	------	--------	---	---	------	---	---	------

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Unit	2 Unit	2	2	100%	2	2	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	2 Unit	2	2	100%	2	2	100%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</i>	nilai	80.90 nilai						

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</i>	poin	90.41 poin						
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>	Komunitas	18 Komunitas	18	18	100%	18	18	100%

Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>	Permohonan	4 Permohonan	4	4	100%	4	4	100%
Penyusunan Konten	<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>	Konten	8 Konten	-	-	0%	-	-	0%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</i>	indeks	3.07 indeks						

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Domanin/Sub Web Pemkab</i>	domain	130 domain						
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>	Dokumen	4 Dokumen	4	4	100%	4	4	100%
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Layanan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	persentase	85 persentase	85%	85%	100%	85%	85%	100%

Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	<i>Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional</i>	Aplikasi	180 Aplikasi	180	180	100%	180	180	100%
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>	Laporan	2 Laporan	2	2	100%	2	2	100%

Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>	Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2	2	100%
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	<i>Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan</i>	Dokumen	4 Dokumen	-	-	0%	-	-	0%

Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	Dokumen	16 Dokumen	16	16	100%	16	16	100%
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>	Aplikasi	4 Aplikasi	4	4	100%	4	4	100%

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	<i>Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas</i>	unit	2 unit	2	2	100%	2	2	100%
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	Perangkat Daerah	74 Perangkat Daerah	74	74	100%	74	74	100%

Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	<i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>	Aplikasi	8 Aplikasi	-	-	0%	-	-	0%
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	Perangkat Daerah	74 Perangkat Daerah	74	74	100%	74	74	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</i>	poin	1.8 poin						

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat daerah yang mengintegrasikan data statistik sektoral</i>	persentase	2,6 persentase						
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	Orang	4 Orang	4	4	100%	4	4	100%

Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>	Persentase	80 Persentase	80	80	80%	80	80	80%
---	--	------------	------------------	----	----	-----	----	----	-----

Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>	Persentase	80 Persentase						
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>	Dokumen	2 Dokumen		2	100%	2	2	100%

Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	<i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i>	Dokumen	2 Dokumen		2	100%	2	2	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</i>	Persentase	100 Persentase						

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi</i>	persentase	80 persentase						
---	---	-------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>	Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2	2	100%
---	---	---------	-----------	---	---	------	---	---	------

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	Perangkat Daerah	74 Perangkat Daerah	74	74	100%	74	74	100%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi	persentase	80 persentase						

Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	74 Perangkat Daerah	74	74	100%	74	74	100%
---	--	------------------	---------------------	----	----	------	----	----	------

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator hasil kegiatan pembangunan.

Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) merupakan syarat mutlak dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta didorong kepada tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan yang tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024.

Keberhasilan proses perencanaan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

II. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
 - 7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
- d. pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan program bidang komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mengoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari:

B. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana keuangan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan bahan pengolahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan insfastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan infrastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkann bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem e-government.

Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Layanan E-Government;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerj, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan E-Government sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem e-government;

- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Layanan E-Government;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Layanan E-Government; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan E-Government mengoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari:

A. Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengolahan data dan statistik;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengolahan data dan statistic.
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengolahan data dan statistik;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengolahan data dan statistik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Persandian;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Persandian sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pengendalian kegiatan di Bidang Persandian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Persandian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 66 orang terdiri dari 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 tenaga Non ASN. Adapun rincian tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Data PNS Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Jenis Kelamin
1	Kepala Dinas	1	II b	Pria
2	Sekretaris Dinas	1	III a	Pria
3	Kepala Bidang	4	III b	Pria
4	Kepala Seksi/Sub Bagian	3	IV a	Pria
5	Sub Koordinator	8	-	Pria/Wanita
6	Jabatan Fungsional	3	-	Wanita
7	Pelaksana	9	-	Pria
	JUMLAH	29		

Tabel 2. 3 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1	Sarjana Strata III	0	Pria/Wanita
2	Sarjana Strata II	6	Pria/Wanita
3	Sarjana Strata I	17	Pria/Wanita
4	Sarjana Diploma III	5	Pria/Wanita
5	SLTA	1	Pria/Wanita
	JUMLAH	29	

Tabel 2. 4 Data Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1	Sarjana Starta I	12	Pria/Wanita
2	Sarjana Diploma III	17	Pria/Wanita
3	SLTA	8	Pria/Wanita
	JUMLAH	37	

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD				74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,47 BB	belum	63,10 BB						
2	Peningkatan Predikat Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis				2,56 Cukup	2,60 Baik	2,70 Baik	2,97 Baik	3,50 Sangat Baik	2,56 Cukup	2,97 Baik	2,30 Cukup	3,34 Baik						

	Elektronik (SPBE)																		
3	Peningkatan Kualifikasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik				- Tidak informatif	62,32 Cukup informatif	69,84 Cukup informatif	70,00 Menuju informatif	80,00 Informatif	- Tidak informatif	62,32 Cukup informatif	69,84 Cukup informatif	75,88 Informatif						
4	Presentase SKPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	50%	92%	82,35%							
5	Presentase Penyelenggara				N/A	10%	15%	20%	25%	N/A	10%	15%							

	raan Persandian untuk Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota.																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses pembangunan, antara lain:

1. Perencanaan belum didukung oleh data akurat sehingga dokumen perencanaan yang disusun belum mampu menampilkan kondisi obyektif yang dihadapi secara menyeluruh.
2. Dokumen perencanaan belum mampu menampung seberapa besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena terbatasnya sumberdaya yang ada dan sebaran wilayah yang sangat luas.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan belum dapat berjalan optimal, hal ini dikarenakan jumlah tenaga/aparatur pengelola/penyusun administrasi pelaporan yang terbatas sehingga penyampaian laporan tepat waktu terhambat.
4. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai aspek teknis di bidang komunikasi dan informasi menyebabkan terhambatnya pelayanan yang dapat diberikan.
5. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang masih sangat terbatas jumlahnya/memadai.

IV. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubu Raya tahun anggaran yang sedang disusun menunjukkan upaya yang baik dalam merumuskan kebijakan dan program yang sejalan dengan visi misi pemerintah daerah. Diskominfo sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi publik dan sistem informasi di daerah, diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pada Rancangan Awal RKPD ini, beberapa prioritas program yang dicantumkan cukup relevan dengan tantangan yang dihadapi, seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan e-government, serta penguatan sistem komunikasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat dilihat pada table 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif 2025	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana 2026	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.657.044.107,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.988.453.136,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.128.436.063,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.354.123.484,00	
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.13 poin	6.933.778.614,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.13 poin	8.320.534.543,00	

2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	151.400.024,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	181.680.029,00	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.262.906,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.515.487,00	
2	16	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.262.906,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.515.487,00	

2	16	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.262.906,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.515.487,00	
2	16	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.262.906,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.515.487,00	
2	16	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	11.262.906,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	13.515.487,00	

							n Dokumen Perubahan DPA- SKPD					n Dokumen Perubahan DPA- SKPD			
2	1 6	0 1	2.0 6	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lapora n	78.437.09 2,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lapora n	94.124.51 1,00	
2	1 6	0 1	2.0 7	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lapora n	16.648.40 2,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lapora n	19.978.08 3,00	

2	1 6	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah dokumen Administra si Keuangan Perangkat Daerah	1 dokum en	4.830.044. 891,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah dokumen Administra si Keuangan Perangkat Daerah	1 dokum en	5.796.053. 870,00	
2	1 6	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disko minfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	4.810.529. 115,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disko minfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	5.772.634. 938,00	
2	1 6	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokum en	6.505.260, 00	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Disko minfo	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokum en	7.806.312, 00	
2	1 6	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan	1 Lapora n	6.505.258, 00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan	1 Lapora n	7.806.310, 00	

							Kuangan Akhir Tahun SKPD					Kuangan Akhir Tahun SKPD			
2	1 6	0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semester an SKPD	1500 Lapora n	6.505.258, 00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semester an SKPD	1500 Lapora n	7.806.310, 00	
2	1 6	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah dokumen Administra si Barang Milik Daerah pada	1 dokum en	17.155.71 7,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah dokumen Administra si Barang Milik Daerah pada	1 dokum en	20.586.86 2,00	

							Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.577.859,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.293.431,00	
2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.577.858,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.293.431,00	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ASN yang difasilitasi	28 orang	240.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ASN yang difasilitasi	28 orang	288.000.000,00	

2	1 6	0 1	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disko minfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.00 0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disko minfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	72.000.00 0,00	
2	1 6	0 1	2.0 5	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disko minfo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	1 Dokum en	36.000.00 0,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disko minfo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	1 Dokum en	43.200.00 0,00	
2	1 6	0 1	2.0 5	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disko minfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokum en	36.000.00 0,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disko minfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokum en	43.200.00 0,00	
2	1 6	0 1	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disko minfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	72.000.00 0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disko minfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	86.400.00 0,00	

							Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan			
2	1 6	0 1	2.0 5	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disko minfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	18.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disko minfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	21.600.000,00	
2	1 6	0 1	2.0 5	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disko minfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	18.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disko minfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	21.600.000,00	
2	1 6	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah penyediaa n layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	240.719.538,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disko minfo	Jumlah penyediaa n layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	288.863.449,00	

2	1 6	0 1	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Disko minfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.119.92 8,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Disko minfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.143.91 4,00	
2	1 6	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disko minfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.119.92 2,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disko minfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	2 Paket	48.143.90 7,00	
2	1 6	0 1	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disko minfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	40.119.92 2,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disko minfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	48.143.90 7,00	
2	1 6	0 1	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Disko minfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	12 Paket	40.119.92 2,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Disko minfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	12 Paket	48.143.90 7,00	

2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disko minfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2190 Dokumen	40.119.922,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disko minfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2190 Dokumen	48.143.907,00	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	40.119.922,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disko minfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	48.143.907,00	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disko minfo	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit	54.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disko minfo	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit	64.800.000,00	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Disko minfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.000.000,00	Pengadaan Mebel	Disko minfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21.600.000,00	

2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disko minfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disko minfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43.200.000,00	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disko minfo	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1.300.304.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disko minfo	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1.560.365.480,00	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disko minfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	132.048.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disko minfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	158.457.600,00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disko minfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37 Laporan	1.168.256.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disko minfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37 Laporan	1.401.907.880,00	

							yang Disediakan					yang Disediakan			
2	1 6	0 1	2.0 8	00 04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Disko minfo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang dipelihara	1 unit	100.154.0 44,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Disko minfo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang dipelihara	1 unit	120.184.8 53,00	
2	1 6	0 1	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disko minfo	Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	36.674.04 4,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disko minfo	Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	44.008.85 3,00	

2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disko minfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	27.480.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disko minfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.976.000,00	
2	16	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disko minfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	36.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disko minfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	43.200.000,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Disko minfo	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80.90 nilai	240.423.662,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Disko minfo	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80.90 nilai	288.508.394,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Disko minfo	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80.00 poin	240.423.662,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Disko minfo	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80.00 poin	288.508.394,00	

					Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Disko minfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 Komunitas	33.781.671,00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Disko minfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 Komunitas	40.538.005,00	
2	16	02	2.02	0017	Pelayanan Informasi Publik	Disko minfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-an	2 Permohonan	172.860.321,00	Pelayanan Informasi Publik	Disko minfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-an	2 Permohonan	207.432.385,00	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Disko minfo	Jumlah Konten Informasi Publik	4 Konten	33.781.670,00	Penyusunan Konten	Disko minfo	Jumlah Konten Informasi Publik	4 Konten	40.538.004,00	

2	1	0			PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI INFORMATI KA	Disko minfo	Indeks Layanan Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik (SPBE)	2.60 indeks	3.954.233. 787,00	PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI INFORMATI KA	Disko minfo	Indeks Layanan Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik (SPBE)	2.60 indeks	4.745.080. 547,00	
2	1	0	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Disko minfo	Jumlah Domanin/S ub Web Pembab	115 domain	47.497.51 9,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Disko minfo	Jumlah Domanin/S ub Web Pembab	115 domain	56.997.02 3,00	
2	1	0	2.0	00 02	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggar aan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain	Disko minfo	Jumlah Dokumen Pengelolaa n Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain	2 Dokum en	47.497.51 9,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggar aan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain	Disko minfo	Jumlah Dokumen Pengelolaa n Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain	2 Dokum en	56.997.02 3,00	

					Pemerintah Desa		Pemerintah Desa			Pemerintah Desa		Pemerintah Desa			
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Layanan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 persentase	3.906.736.268,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Layanan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 persentase	4.688.083.524,00	
2	16	01	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	90 Aplikasi	6.744.928,00	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	90 Aplikasi	8.093.914,00	
2	16	01	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Diskominfo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di	1 Laporan	6.744.928,00	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Diskominfo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di	1 Laporan	8.093.914,00	

							lingkungan Pemda					lingkungan Pemda			
2	16	01	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	686.319.826,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	823.583.791,00	
2	16	01	2.19	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	6.744.928,00	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	8.093.914,00	
2	16	01	0,085	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan	8 Dokumen	6.744.928,00	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan	8 Dokumen	8.093.914,00	

							Manajeme n SPBE					Manajeme n SPBE			
2	1 6	0 1	2.1 9	00 20	Pembanguna n dan/atau Pengembang an Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembang kan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikas i	6.744.928, 00	Pembanguna n dan/atau Pengembang an Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembang kan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikas i	8.093.914, 00	
2	1 6	0 1	2.2 0	00 23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggar aan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah perangkat daerah yang mendapatk an sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	1 unit	6.744.928, 00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggar aan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah perangkat daerah yang mendapatk an sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	1 unit	8.093.914, 00	

2	16	01	2.21	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	37 Perangkat Daerah	235.783.648,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	37 Perangkat Daerah	282.940.377,00	
2	16	01	2.22	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	6.744.928,00	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	8.093.914,00	
2	16	01	2.23	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah	2.937.418.298,00	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah	3.524.901.958,00	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN				289.964.080,00	URUSAN PEMERINTAHAN				347.956.895,00	

					BIDANG STATISTIK					BIDANG STATISTIK					
2	2 0	0 2			PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangu nan Statistik (IPS)	1.8 poin	289.964.0 80,00	PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangu nan Statistik (IPS)	1.8 poin	347.956.8 95,00	
2	2 0	0 2	2.0 1		Penyelenggar aan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/K ota		Persentase Perangkat daerah yang mengintegr asikan data statistik sektoral	1,8 persent ase	289.964.0 80,00	Penyelenggar aan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/K ota		Persentase Perangkat daerah yang mengintegr asikan data statistik sektoral	1,8 persent ase	347.956.8 95,00	
2	2 0	0 2	2.0 1	00 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatk an pelatihan di bidang statistik	2 Orang	57.992.81 6,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatk an pelatihan di bidang statistik	2 Orang	69.591.37 9,00	

2	202	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	80 Persentase	57.992.816,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	80 Persentase	69.591.379,00	
2	202	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Persentase	57.992.816,00	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Persentase	69.591.379,00	
2	202	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	57.992.816,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	69.591.379,00	

2	202	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	57.992.816,00	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	69.591.379,00	
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				238.643.964,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				286.372.757,00	
2	212			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 Persentase	238.643.964,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 Persentase	286.372.757,00	
2	212	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan	80 persentase	224.064.386,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan	80 persentase	268.877.263,00	

					Kabupaten/Kota		keamanan informasi			Kabupaten/Kota		keamanan informasi			
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	19.739.706,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	23.687.647,00	
2	21	02	2.02	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	204.324.680,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	245.189.616,00	

2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	80 Persentase	14.579.578,80	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	80 Persentase	17.495.494,56	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	14.579.578,80	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	17.495.494,56	
									14.579.578,80						

V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang ada. Masyarakat sering kali mengajukan usulan terkait peningkatan infrastruktur teknologi, layanan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Diskominfo perlu melakukan penelaahan yang cermat terhadap setiap usulan yang masuk, untuk memastikan bahwa program yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam proses penelaahan, Diskominfo perlu mengevaluasi relevansi dan kelayakan setiap usulan program dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur TIK yang ada di daerah. Misalnya, usulan terkait pembangunan jaringan internet di desa-desa terpencil harus dianalisis dengan memperhitungkan faktor geografis, kebutuhan masyarakat, serta potensi dukungan teknis dan finansial yang tersedia. Penelaahan ini juga harus melihat keterkaitan antara usulan dengan prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan akses informasi publik, digitalisasi layanan pemerintahan, atau pengembangan ekonomi digital. Dengan demikian, usulan yang dipilih harus dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Selain itu, penting bagi Diskominfo untuk melakukan penelaahan terhadap potensi keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari setiap usulan program. Misalnya, apabila ada usulan untuk meluncurkan aplikasi layanan publik berbasis digital, perlu ada evaluasi terhadap kesiapan SDM baik di level pemerintah maupun masyarakat untuk mengoperasikan dan memelihara aplikasi tersebut. Usulan yang diterima juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dari sisi pembiayaan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, program yang dijalankan bisa menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan keberlanjutannya.

Proses penelaahan juga harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapannya, sehingga usulan yang dipilih benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dan dapat diterima oleh warga. Diskominfo perlu memastikan bahwa ada mekanisme partisipasi yang terbuka dan transparan dalam menerima masukan dari masyarakat, baik melalui forum diskusi, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), atau survei daring. Dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam

proses penelaahan, Diskominfo dapat mengidentifikasi prioritas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat serta menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Secara keseluruhan, penelaahan yang tepat terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan Diskominfo dapat meningkatkan konektivitas, akses informasi, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif di era digital.

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

VI. Tidak Ada Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Keterbatasan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Pada tahun 2025, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan berbagai pihak yang seharusnya terlibat dalam perencanaan program. Beberapa pihak mungkin merasa kurang mendapat informasi yang cukup mengenai proses perencanaan, sehingga mereka tidak merasa perlu atau belum siap untuk memberikan usulan atau masukan.

2. Kurangnya Pemahaman Tentang Prioritas Pembangunan

Selain itu, tidak adanya usulan program juga dapat diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari pemangku kepentingan mengenai prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang fokus dan tujuan pembangunan, berbagai instansi atau kelompok masyarakat mungkin merasa bahwa usulan mereka tidak akan berdampak atau tidak sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi dalam merumuskan program dan kegiatan yang relevan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Kesulitan dalam Menyusun Program yang Terintegrasi

Di sisi lain, bisa jadi pemangku kepentingan merasa kesulitan dalam menyusun usulan program yang terintegrasi dengan kebijakan dan program lainnya. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran yang cukup luas dalam mendukung infrastruktur digital, namun seringkali program-program ini membutuhkan sinergi dengan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tanpa adanya koordinasi yang matang dan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan lintas sektor, para pemangku kepentingan mungkin merasa bahwa program yang

mereka usulkan tidak akan dapat berjalan dengan efektif atau mengalami tumpang tindih dengan program yang sudah ada.

4. Terbatasnya Akses dan Fasilitas untuk Menyampaikan Usulan

Terkadang, tidak adanya usulan juga disebabkan oleh terbatasnya akses dan fasilitas yang memadai untuk menyampaikan ide atau masukan dalam proses musrenbang. Beberapa pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki saluran yang mudah untuk berpartisipasi atau menyampaikan usulan mereka. Proses perencanaan yang terpusat atau kurang inklusif dapat menghambat partisipasi dari berbagai pihak, terutama kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya atau informasi.

5. Ketidaksiapan untuk Menghadapi Perubahan Teknologi

Sebagian pemangku kepentingan mungkin juga merasa kurang siap atau tidak memiliki cukup informasi mengenai perubahan teknologi yang cepat terjadi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, dan terkadang hal ini menimbulkan kekhawatiran atau kebingungan di kalangan beberapa pihak mengenai bagaimana teknologi baru ini dapat dimanfaatkan atau diintegrasikan ke dalam program-program yang ada. Karena itu, tanpa adanya pemahaman atau kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan ini, para pemangku kepentingan mungkin tidak mengajukan usulan yang spesifik pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan konteks daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan nasional yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti pengembangan e-government, pemerataan akses internet, dan peningkatan literasi digital, memiliki dampak besar terhadap efektivitas pelayanan publik dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Diskominfo Kubu Raya untuk mengadaptasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, seperti infrastruktur yang ada, tingkat literasi digital masyarakat, serta kebutuhan spesifik dari berbagai sektor pemerintahan di daerah.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi fokus utama adalah pengembangan infrastruktur TIK yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kebijakan ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki wilayah yang luas dan sebagian besar terdiri dari daerah perdesaan. Oleh karena itu, Diskominfo Kubu Raya perlu memastikan bahwa program pemerataan akses internet yang diusung dalam kebijakan nasional dapat dijalankan dengan efektif di seluruh kecamatan, termasuk daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini, kolaborasi dengan penyedia layanan internet dan pihak swasta sangat penting untuk meningkatkan kualitas jaringan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Selain itu, kebijakan nasional yang mendorong penerapan e-government di seluruh instansi pemerintahan harus dipertimbangkan dengan cermat oleh Diskominfo Kubu Raya. Pengimplementasian e-government di tingkat kabupaten memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, perlu ada evaluasi mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah, baik dari sisi keterampilan teknis maupun pemahaman terhadap pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan. Diskominfo Kubu Raya harus merencanakan program pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan agar transisi ke e-government berjalan lancar dan efektif.

Kebijakan nasional juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, yang seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Di

Kabupaten Kubu Raya, tingkat literasi digital masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Diskominfo Kubu Raya harus merancang program-program edukasi yang bisa mengatasi kesenjangan digital ini, seperti pelatihan penggunaan internet, aplikasi layanan publik, serta edukasi mengenai keamanan siber. Peningkatan literasi digital tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi penting dengan lebih mudah dan cepat.

Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, Diskominfo Kubu Raya perlu memperhatikan faktor keberlanjutan dari program-program yang dijalankan. Setiap kebijakan atau proyek yang diusulkan, seperti pembangunan infrastruktur TIK atau pelatihan literasi digital, harus memiliki rencana pemeliharaan dan pengembangan yang jelas. Tanpa adanya komitmen untuk keberlanjutan, program yang berhasil diluncurkan dapat terhambat atau bahkan terhenti setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, perencanaan yang matang terkait dengan alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan evaluasi program perlu menjadi bagian integral dari setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, kebijakan nasional yang diimplementasikan oleh Diskominfo Kubu Raya dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah.

II. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kubu Raya

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya memiliki tujuan yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuan utama dari Renja Diskominfo adalah untuk mempercepat transformasi digital di daerah, memperkuat infrastruktur TIK, dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. Hal ini sejalan dengan visi nasional dan daerah dalam mendorong pembangunan berbasis teknologi serta mendukung terciptanya layanan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satu tujuan utama dalam Renja Diskominfo adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur TIK di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya. Hal ini mencakup pembangunan dan perbaikan jaringan internet, terutama di daerah-daerah

yang masih sulit dijangkau oleh akses digital. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan dapat tercipta pemerataan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Kubu Raya, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, mempermudah akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Selain itu, Renja Diskominfo juga bertujuan untuk mendorong implementasi e-government yang efisien, yang akan mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui e-government, layanan publik akan lebih cepat, transparan, dan terjangkau, serta meminimalkan praktik-praktik birokrasi yang berbelit-belit. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dalam mengelola sistem informasi dan teknologi, yang sangat penting untuk keberhasilan program-program digitalisasi di pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan SDM akan menjadi salah satu fokus utama dalam Renja Diskominfo untuk memastikan kelancaran implementasi teknologi dalam pelayanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Diskominfo Kubu Raya mencakup penguatan kapasitas dan kemampuan teknis aparatur pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi, baik dalam hal administrasi pemerintahan, pengelolaan data, maupun layanan publik digital. Salah satu sasaran yang penting adalah terciptanya sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, sehingga memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, Diskominfo juga menargetkan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, dengan mengadakan berbagai program edukasi untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi, khususnya dalam hal akses informasi, e-commerce, dan layanan pemerintah berbasis digital.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi daerah, memperkuat infrastruktur TIK, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Dengan tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan Diskominfo dapat berperan sebagai penggerak utama dalam membangun daerah yang lebih modern, terhubung, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

III. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk dua tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.641.587.870,0 0				13.988.453.1 36,00
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.126.587.870,0 0				13.354.123.4 84,00
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5.994.122.898,0 0			63.13 poin	8.320.534.54 3,00

2	1 6	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		219.936.407,00			4 dokume n	181.680.029, 00
2	1 6	0 1	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	37.324.60 0	49.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		2 Dokume n	13.515.487,0 0
2	1 6	0 1	2.02	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	52.035.37 0	50.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Dokume n	13.515.487,0 0
2	1 6	0 1	2.03	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	37.502.42 0	15.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA		1 Dokume n	13.515.487,0 0

						Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				SI UMUM			
2	16	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	13.515.487,00
2	16	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		11.698.294,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	13.515.487,00

2	1 6	0 1	2.06	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	52.035.37 0	65.364.444,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	2 Laporan	94.124.511,0 0
2	1 6	0 1	2.07	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	37.502.42 0	13.873.669,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	2 Laporan	19.978.083,0 0
2	1 6	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		4.176.591.126,0 0		1 dokume n	5.796.053.87 0,00

2	1 6	0 1	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.558.959.158	4.158.774.263,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28 Orang/bulan	5.772.634.938,00
2	1 6	0 1	2.02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1500 Dokumen	7.806.312,00
2	1 6	0 1	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.501.450	13.816.863,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	7.806.310,00

2	1 6	0 1	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	1.628.300	2.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	15000 Laporan	7.806.310,00
2	1 6	0 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		37.500.000,00		1 dokume n	20.586.862,0 0
2	1 6	0 1	2.03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		18.750.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	1 Laporan	10.293.431,0 0

2	1 6	0 1	2.03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	20.376.43 4	18.750.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	1 Laporan	10.293.431,0 0
2	1 6	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		105.000.000,00		28 orang	288.000.000, 00
2	1 6	0 1	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		30.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	1 Paket	72.000.000,0 0
2	1 6	0 1	2.05	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		16.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	1 Dokume n	43.200.000,0 0

2	1 6	0 1	2.05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		16.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Dokume n	43.200.000,0 0
2	1 6	0 1	2.05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		15.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		2 Orang	86.400.000,0 0
2	1 6	0 1	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		13.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		5 Orang	21.600.000,0 0
2	1 6	0 1	2.05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		13.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		5 Orang	21.600.000,0 0

2	1 6	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		161.000.000,00			12 bulan	288.863.449,00
2	1 6	0 1	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.836.100	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	48.143.914,00
2	1 6	0 1	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	48.143.907,00
2	1 6	0 1	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.840.091	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Paket	48.143.907,00

2	1 6	0 1	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	7.677.630	15.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		12 Paket	48.143.907,0 0
2	1 6	0 1	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	3.600.000	3.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		2190 Dokume n	48.143.907,0 0
2	1 6	0 1	2.06	00 09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	86.510.80 5	103.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		5 Laporan	48.143.907,0 0
2	1 6	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		42.500.000,00			1 unit	64.800.000,0 0

2	1 6	0 1	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		2.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Unit	21.600.000,0 0
2	1 6	0 1	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	92.362.19 6	40.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Unit	43.200.000,0 0
2	1 6	0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		1.251.595.365,0 0			1 laporan	1.560.365.48 0,00
2	1 6	0 1	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	230.731.2 72	165.040.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		24 Laporan	158.457.600, 00

2	1 6	0 1	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		1.035.500.000,0 0	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		37 Laporan	1.401.907.88 0,00
2	1 6	0 1	2.08	00 04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA					1 unit	120.184.853, 00
2	1 6	0 1	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	25.608.30 0	42.182.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		4 Unit	44.008.853,0 0
2	1 6	0 1	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		3.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA		1 Unit	32.976.000,0 0

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				SI UMUM			
2	16	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5.373.365,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	43.200.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		295.000.000,00			80.90 nilai	288.508.394,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		295.000.000,00			90.41 poin	288.508.394,00

2	1 6	0 2	2.01	00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		56.534.263,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Komunitas	40.538.005,00
2	1 6	0 2	2.02	00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	193.144.400	137.212.896,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Permohonan	207.432.385,00
2	1 6	0 2	2.01	00 23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		162.867.000	101.252.841,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Konten	40.538.004,00

2	1 6	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.837.464.972,00			3.0 indeks	4.745.080.547,00
2	1 6	0 3	2.01	00 04	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domanin/Sub Web Pemkab	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		60.000.000,00			130 domain	56.997.023,00
2	1 6	0 3	2.01	00 02	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	158.366.180	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	56.997.023,00

					Pemerintah Desa	Domain Pemerintah Desa							
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.777.464.972,00			85 persentase	4.688.083.524,00
2	16	01	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Aplikasi	8.093.914,00
2	16	01	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	8.093.914,00

2	1 6	0 1	2.02	00 16	Penyelenggaraa n pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubunga n pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	308.376.0 28	200.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Dokume n	823.583.791, 00
2	1 6	0 1	2.19	00 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		40.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		2 Dokume n	8.093.914,00
2	1 6	0 1	0,08 47	00 19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		15.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		8 Dokume n	8.093.914,00

2	1 6	0 1	2.19	00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Aplikasi	8.093.914,00
2	1 6	0 1	2.20	00 23	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 unit	8.093.914,00
2	1 6	0 1	2.21	00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.058.257.980	2.052.464.972,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37 Perangkat Daerah	282.940.377,00

2	16	01	2.22	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Aplikasi	8.093.914,00
2	16	01	2.23	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37 Perangkat Daerah	3.524.901.958,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				135.000.000,00				347.956.895,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		135.000.000,00			1.8 poin	347.956.895,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang mengintegrasikan data statistik sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		135.000.000,00			2,6 persentase	347.956.895,00

2	202	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	265.595.534	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	69.591.379,00
2	202	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Persentase	69.591.379,00
2	202	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Persentase	69.591.379,00

2	202	2.01	0010	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		50.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Dokume n	69.591.379,0 0
2	202	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik			25.000.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Dokume n	69.591.379,0 0
2	21			URUSAN PEMERINTAH N BIDANG PERSANDIAN				380.000.000,00				286.372.757, 00
2	21	02		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		380.000.000,00			100 persent ase	286.372.757, 00
2	21	02	2.01	Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menggunaka n layanan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		354.525.000,00			80 persenta se	268.877.263, 00

					Daerah Kabupaten/Kota	keamanan informasi							
2	2 1	0 2	2.01	00 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	13.900.40 0	65.025.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		1 Dokume n	23.687.647,0 0
2	2 1	0 2	2.02	00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi		244.900.1 00	289.500.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		37 Perangk at Daerah	245.189.616, 00
2	2 1	0 2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase Keterhubung an perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		25.475.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA		80 Persent ase	17.495.494,5 6

					Kabupaten/Kota					SI UMUM			
2	2 1	0 2	2.02	00 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		41.523.20 0	25.475.000,00	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM		37 Perangk at Daerah	17.495.494,5 6

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen yang memuat perencanaan tahunan terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. RKPD disusun untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RKPD harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta memadukan antara prioritas nasional, daerah, dan aspirasi publik. Selain itu, RKPD menjadi acuan untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program-program pembangunan daerah.

Rencana kerja yang tercantum dalam RKPD harus jelas dan terukur, dengan indikator kinerja yang dapat memantau sejauh mana tujuan pembangunan tercapai. Dalam penyusunan rencana kerja ini, perangkat daerah harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah. Proses ini juga mencakup analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, guna menentukan prioritas pembangunan yang realistis dan tepat sasaran.

Pendanaan adalah elemen kunci dalam implementasi RKPD. Setiap program atau kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja harus disertai dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan. Pendanaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber-sumber lain seperti dana hibah atau partisipasi swasta. Pendanaan harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tanpa menimbulkan potensi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

Untuk memastikan bahwa pendanaan yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, perangkat daerah perlu melakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap prioritas program dan kegiatan yang telah ditentukan, serta memastikan adanya alokasi yang memadai untuk masing-masing sektor. Pengelolaan pendanaan juga harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan anggaran yang seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan RKPD dan penggunaan anggaran sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa seluruh program dapat

berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, seperti badan pengawasan internal, serta partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, diharapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat tercapai dengan hasil yang maksimal dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah.

Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.450.422.080
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.157.415
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.665.787
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.256.259
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.235.369
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.752.361.573
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.897.576
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.817.470
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.646.527
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.776.820
1)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.776.820
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.453.546
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.836.100
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.170.346
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.350
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.600.000

5)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDa	98.847.750
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
1)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.109.826
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.509.826
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.562.900
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.562.900
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	378.212.624
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	378.212.624
1)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0
2)	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0
3)	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0
4)	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	200.945.624
5)	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	0
6)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	177.267.000
7)	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
C.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.085.523.920
9	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	234.122.144

1)	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	168.686.776
2)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	65.435.368
10	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.851.401.776
1)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	20.681.532
2)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	308.376.028
3)	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	165.628.473
4)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.174.136.217
5)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.132.791
6)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	132.446.735
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	265.595.534
11	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	265.595.534
1)	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	265.595.534
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	309.440.849
12	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	266.919.051
1)	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.904.855
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.014.196
13	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	41.521.798
1)	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.521.798
	TOTAL	8.489.195.007

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses pelayanan di bidang komunikasi dan informasi serta untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 yang secara substansi disusun dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Tindak lanjut pengalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan usulan pembiayaan sebagaimana dokumen Renja akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran masing-masing dengan berazaskan efisiensi dan akuntabel.
4. Segala bentuk tindakan yang tercantum dalam rencana kerja berorientasi kepada upaya akselerasi/percepatan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan segala perubahan yang timbul akibat perkembangan dinamika yang mempengaruhinya akan dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.